



BERSAMA | Ketua DPRD Sumbar Supardi, sejumlah narasumber, panita dan peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemangku Kebudayaan yang dilaksanakan di Bukittinggi. (ist)

KETUA DPRD SUMBAR SUPARDI:

Perlu Penguatan Pemangku Kebudayaan

BUKITINGGI - SINGGALANG

Ketua DPRD Sumbar, Supardi, mengajak masyarakat adat yang terdiri dari ninik mamak, bundo kanduang, alim ulama, hingga cadiak pandai hingga panga nagari, untuk memberikan kontribusi dalam menyelesaikan persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Supardi saat membuka bimbingan teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pemangku Kebudayaan se Kota Payakumbuh, Jumat (17/5) di salah satu hotel di Bukittinggi.

Supardi mengatakan, dalam sektor ekonomi dulunya Sumbar merupakan provinsi yang merajai perputaran uang di pulau Sumatera. Sekarang secara statistik pertumbuhan ekonomi (PE) Sumbar justru berada pada peringkat lima.

Seiring perputaran uang

mengalami penurunan, gaya hidup pun juga mengalami pergeseran, dimana banyak masyarakat yang terlalu memaksa untuk memiliki sesuatu. Hal itu dibuktikan dengan maraknya pertumbuhan lembaga pemberi kredit (leasing-red).

"Leasing bisa menghimpun dana masyarakat lebih kurang Rp10 miliar sehari," katanya.

Persoalan lain yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah menekan angka pengangguran yang masih 5,2 persen. Sementara di Kota Payakumbuh menempati peringkat ketiga se-Sumbar angka penganggurannya dengan persentase 4,84. Namun pada tingkat pendidikan, Payakumbuh jauh lebih baik dari daerah-daerah lain di Sumbar.

"Hal-hal tersebut menjadi beberapa persoalan yang harus menjadi perhatian bersama bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Namun peran masyarakat sangat penting untuk menyelesaikan

persoalan-persoalan sosial di tengah masyarakat," katanya.

Supardi mengatakan, ketika pengangguran masih tergolong tinggi, maka akan berdampak terhadap tingginya tingkat kriminalitas. Selain itu peredaran narkoba juga akan berkembang dan terus meningkat, sehingga harus diselesaikan secara bersama-sama.

Dia melihat pemangku adat juga harus meningkatkan kapasitas diri karena menyangkut kelangsungan dalam manajemen memimpin masyarakat. Tentunya hal itu seiring dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang Sumatera Barat. Dalam regulasi itu ditegaskan, filosofis Minangkabau adalah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah.

Bimtek yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Sumbar melalui pokok pikiran Supardi ini, bisa menjadi media transfer ilmu pada generasi muda melalui masyarakat adat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Jefrinal Arifin. Narasumber Buya Zuari Abdullaj, Irwan Malin Basa, S. Metron Masdison, Kepala Bidang Warisan Budaya dan Permuseum Nurdianti, Aprimas.

Jefrinal mengatakan, perlu ada penguatan adat dan budaya bagi pemangku adat. Karena dengan penguatan itu dapat mempertahankan eksistensi adat dan budaya Minangkabau di tengah-tengah masyarakat.

"Tujuannya, bagaimana pemahaman terhadap adat dan budaya Minangkabau ini semakin kuat. Semakin hidup di tengah-tengah masyarakat," sebutnya.

Dikatakannya, bimtek dengan tema "Tarandam-ramandam Indak Basak, Tarapuang-apuang Indak Anyuik" tersebut, guna mendorong pemangku adat untuk meneruskan pada generasi muda penerapan adat budaya dalam kehidupan sehari-hari. (401)

Baznas Sijunjung Kirim Tim BTB ke Lokasi Bencana

Sijunjung, Singgalang

Dalam upaya membantu masyarakat yang terkena bencana, Baznas Sijunjung kirim tim Baznas Tanggap Bencana (BTB) ke daerah bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam. Tim BTB kabupaten ini dipimpin langsung Waka II Syahril Syahda, SH.

Bersama pimpinan Baznas Sijunjung ini juga diikuti dua orang Amil Pelaksana (Agung Pratama, S.Sos dan Defrizal Pratama) serta tiga orang relawan (Oktalyan Ramadhan, Chanyul Hamid, Fahrul Zikry) dengan menggunakan mobil Ambulance.

Seperti disebutkan Syahril Syahda, Minggu (19/5), Tim BTB Baznas Sijunjung mendapat sambutan yang luar biasa sesampai di Posko bencana alam Kabupaten Agam, di Bukit Batabuah.

Tim BTB ini disambut



ARAHAN - Pimpinan Baznas Sijunjung (Waka II) Syahril Syahda, memberikan arahan kepada Tim BTB sebelum turun ke lokasi bencana. (ist)

oleh Ketua Baznas Kabupaten Agam Irman Imran dan Waka II Baznas Provinsi Sumbar Dr. Busril serta Ahmad Fahri dari Baznas RI. "Atas nama lembaga dan masyarakat untuk membantu masyarakat kami sangat berterima kasih dan mendoakan semoga Allah membalasnya dengan imbalan pahala kepada tim yang peduli dengan bencana yang kami alami," tambah Syahril mengulangi

ungkapan Irman Imran.

Tim BTB Baznas Kabupaten Sijunjung akan melaksanakan kegiatan tanggap bencana di daerah terdampak banjir bandang dan tanah longsor selama tiga hari.

Selama di lokasi, Tim BTB melaksanakan pelayanan dapur umum, penyediaan air bersih, pelayanan Ambulance, pembersihan lapangan dan pendistribusian kebutuhan harian. (505)

LAHAN TERDAMPAK BANJIR BANDANG

Sektor Pertanian Direkonstruksi, Anggaran Disiapkan

Agam, Singgalang

Pemerintah pusat komitmen mendukung rekonstruksi sektor pertanian di Agam, terutama terkait lahan yang terdampak banjir bandang. Anggaran untuk itu, pun disiapkan.

Penegasan itu disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, saat berkunjung ke Nagari Bukik Batabuah, Canduang, Agam, Sabtu (18/5). Katanya, pemerintah akan menyalurkan bantuan senilai puluhan miliar rupiah untuk pemulihan tersebut.

"Ya, kami akan geser anggaran ke Sumbar ini, karena saudara kita kena musibah. Ini perlu perhatian khusus dan segera mungkin, dan akan kita berikan bantuan dalam waktu dekat," katanya.

Bantuan tersebut tidak hanya mencakup rehabilitasi area pertanian, tetapi juga berbagai bentuk dukungan lainnya. "Kami akan memberikan bantuan sebesar Rp10 miliar untuk rehabilitasi area pertanian. Selain itu, ada pupuk, benih gratis dan alat mesin pertanian yang kami alokasikan," katanya.

Totalnya mencapai Rp20 miliar, dengan Rp10 miliar di antaranya untuk sawah. Pihaknya mengimbau pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan administrasi agar



KUNJUNGI - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan rombongan didampingi Bupati Agam Andri Warman dan lainnya, mengunjungi daerah terdampak banjir bandang di Nagari Bukik Batabuah, Sabtu (18/5). (ist)

bantuan bisa segera direalisasikan dan disalurkan kepada yang membutuhkan.

Amran beserta rombongan menyampaikan dukacita mendalam kepada korban bencana banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Agam. "Saya mengucapkan turut berduka cita atas musibah yang menimpa saudara kita di Sumatera Barat. Kita doakan agar korban khusnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran," kata Mentan.

Banjir bandang yang melanda Kabupaten Agam, tepatnya di kaki Gunung Marapi itu, telah menyebabkan kerusakan luar biasa di lima kecamatan. Tim penanganan darurat terus melakukan pendataan kerugian menyusul

bencana yang terjadi Sabtu pekan lalu.

Dalam kunjungan itu, rombongan Mentan didampingi Bupati Agam Andri Warman dan sejumlah pejabat pekab lainnya. Bupati, mencatat kerusakan parah di sektor pertanian mencapai lebih dari 323,65 hektare. Termasuk areal tanaman pangan dan hortikultura.

Dengan komitmen dari pemerintah pusat dan langkah cepat dari pemerintah daerah, diharapkan rekonstruksi sektor pertanian dapat berjalan lancar dan pemulihan segera terwujud.

"Bantuan ini menjadi harapan baru bagi para petani yang terdampak untuk bangkit kembali dan melanjutkan aktivitas pertanian mereka," kata Andri Warman. (210)

PASCA LONGSOR DAN BANJIR

Pemko Sawahlunto Perpanjang Status Tanggap Darurat



BERSAMA PETUGAS - Penjabat Walikota Sawahlunto Fauzan Hasan ngobrol dengan petugas lapangan yang melakukan penanganan bencana di masa tanggap darurat. (armadison)

Sawahlunto, Singgalang

Pemko Sawahlunto perpanjang status tanggap darurat pasca bencana longsor dan banjir melanda kota itu. Terparah terkena longsor dan banjir kawasan Kecamatan Silungkang.

"Kita di Pemerintah Kota Sawahlunto perpanjang status tanggap darurat 14 hari lagi," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sawahlunto, Dedi Ardona kepada Singgalang, kemarin. Dikatakannya, status tang

gap darurat perpanjang 19 Mei hingga 1 Juni 2024. Sebelumnya Pemerintah Kota Sawahlunto sudah menetapkan status tanggap darurat bencana longsor dan banjir selama 14 hari yang berakhir 18 Mei 2024.


Kata Dedi, kondisi terparah akibat bencana longsor dan banjir, Kawasan Silungkang. Ada 130 titik banjir dan 163 titik longsor. Rumah yang terkena longsor dan banjir 129 unit. Ada 33 unit rumah rusak berat dan 36 unit rumah

rusak sedang, selebihnya rusak ringan.

Disebutkannya, diperpanjang tanggap darurat diambil atas hasil rapat evaluasi penanganan banjir dan longsor di Kecamatan Silungkang yang digelar di Balai Rumah Dinas Walikota, Jumat (17/5) lalu.

Penjabat Walikota Sawahlunto, Fauzan Hasan usai menghadiri pelantikan panitia pemilihan kecamatan di Hotel Khas Ombilin kepada Singgalang mengemukakan, tanggap darurat diperpanjang karena masih belum selesai penanganannya. Katanya, yang belum tertangani saat ini jalan yang putus karena butuh waktu lama. Longsor hampir menimpa setengah badan jalan. Ini tidak bisa diatasi segera mungkin.


Bencana longsor itu terjadi Jumat (3/5) lalu, Jalan lintas Sumatra di Silungkang longsor sehingga menutup badan jalan dan arus lalu lintas terhambat. Jalur Muarokalab-Sawahlunto juga terganggu karena tertimpa longsor tanah. (201)



PT.INGASI RAYA GROUP

Mengucapkan Selamat & Sukses

ATAS PELANTIKAN



Dr. H. Andre H. Algamar, S.STP., SH., MSi., M.Han

Sebagai Pj. Walikota Padang

Dilantik oleh Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi Ansharullah
Jumat, 17 Mei 2024 di Auditorium Gubernur Sumatera Barat

Semoga dapat menjalankan amanah yang diberikan, Aamiin

Tertanda

SUMADI GUNAWAN

PIMPINAN



Bamus DPRD Sumbar Bahas Renstra dan Renja Bersama DPRD Riau

PEKANBARU - SINGGALANG

Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berkunjung ke DPRD Provinsi Riau baru-baru ini. Kunjungan tersebut dalam rangka berbagi informasi rencana atrategis (renstra) dan rencana kerja (renja) sekaligus evaluasi akhir masa jabatan.

Ketua rombongan Bamus DPRD Sumbar, Arkadius Dt. Intan Bano dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas sambutan pimpinan DPRD Provinsi Riau yang begitu baik dan bersahabat.

Ia mengatakan kunjungan Bamus DPRD Sumbar ke DPRD Provinsi Riau telah lama diagendakan dalam kegiatan kedewanan DPRD Sumbar.

"Walaupun telah melakukan perjalanan lebih dari 24 jam karena kondisi bencana yang melanda sejumlah kabupaten/kota, kami tetap melakukan studi komperatif kedewanan sesuai agenda yang telah dijadwalkan. Tujuan studi ini untuk berbagi informasi tentang kegiatan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) kegiatan DPRD baik evaluasi maupun mempersiapkan renja ke depan sesuai amanat undang-undang," katanya.

Selain itu, Arkadius mengatakan, dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD periode 2019-2024, maka dinilai perlu pula dilakukan evaluasi semua tugas-tugas yang menjadi kewajiban kedewanan. Terutama untuk memastikan mana yang belum terselesaikan.

Ia mengatakan, pentingnya peran Bamus dalam menjad-



walkan agenda kegiatan renstra serta kegiatan yang masih dalam pembahasan.

"Ini untuk memastikan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu, yakni sebelum tanggal 28 Agustus 2024 yang menjadi akhir masa jabatan," katanya.

Dalam pertemuan itu, selain membahas tentang renstra dan renja, pada pertemuan tersebut juga dibahas berbagai hal lainnya. Diantaranya tentang rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), ranperda rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan sebagainya. Termasuk pula dibahas tentang retribusi air permukaan PLTA Koto Padang.

Terkait retribusi air permukaan tersebut, DPRD Provinsi Riau juga mengajak dan menyarankan pemerintah provinsi Sumbar mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan pembangunan waduk gunung Malintang. Sehingga debit air



ta jika dilakukan pemeriksaan, jadi setiap kinerja yang terkait Renja dan Renstra akan dijadikan buku menjadi sebagai pegangan Banmus DPRD Sumbar.

Dia mengatakan ketika mesti terjadi perubahan jadwal Bamus yang telah ditetapkan harus melalui paripurna terlebih dahulu, baru bisa diambil keputusan. Ini berkaitan dengan proses pemeriksaan BPK, karena menurutnya seluruh kegiatan kedewanan yang sah harus terjadwal di Banmus, jadi harusnya bisa dilakukan rapat perbulan dengan menyesuaikan agenda.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar yang mendampingi kunjungan Bamus ke DPRD Riau mengatakan, Riau dan Sumbar merupakan provinsi yang bertetangga serta telah banyak melakukan kerjasama di berbagai sektor, jadi selain studi banding, kita bersilaturahmi dan menindaklanjuti kerjasama yang belum terealisasi.

"Terkait tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) Banmus, kita menggali informasi dari Ban-

mus DPRD Riau untuk penguatan Tupoksi Bamus DPRD Sumbar, apa-apa saja inovasi yang dilakukan untuk mengakomodasi kegiatan kedewanan sehingga bisa diterapkan di Sumbar," katanya.

Dia mengatakan, rapat Bamus merupakan rapat tertinggi kedua setelah paripurna, sehingga peran salah satu AKD ini sangat penting terutama dalam penjadwalan kegiatan DPRD untuk melaksanakan fungsi kedewanan.

Bamus merupakan bagian dari DPRD yang berwenang dalam penetapan jadwal atau agenda DPRD, meminta keterangan Komisi atau Badan dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan dan rancangan kegiatan.

Dalam banyaknya agenda penting yang akan dilaksanakan, apakah dalam penetapan jadwal kegiatan DPRD oleh Bamus didahulukan dengan Rapat Gabungan Pimpinan. Hal ini menjadi bahan yang diperdalam dengan Bamus DPRD Riau. (●)



yang masuk ke Koto Panjang dapat terkendali dengan baik. dengan begitu, dampak banjir di kabupaten Kampar dan daerah sekitarnya dapat dikurangi. Karena saat ini kondisi hulu sungai yang masuk ke Koto Panjang hampir tidak terkendali karena ada perusakan hutan.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto, atas nama pemerintah dan masyarakat provinsi Riau menyampaikan duka yang mendalam atas musibah bencana alam yang melanda bumi Minangkabau.

"Semoga para korban menjadi sahid husnul khotimah. Duka Sumbar duka kami juga masyarakat Riau," ungkap Hardianto.

Ia juga menyampaikan, prihatin untuk Sumbar sebagai provinsi bertetangga dekat dan hubungan kekerabatan yang tidak bisa dipisahkan.

Hardianto mengatakan sejarah dan perkembangan peradaban pembangunan Riau dan Sumbar itu adalah satu rumpun melayu. Sehingga silaturahmi tidak akan putus.

Hardianto juga menyampaikan ada banyak perubahan akhir-akhir ini di Sumatera Barat, selain berbagai aktifitas pembangunan dan kondisi bencana alam ini juga ada beberapa teman sekretariat DPRD Sumbar yang terbaik telah berpulang.

"Kemaren pada pas lebaran kami menyampaikan ucapan idul fitri kepada Saudari Rita Suzana tapi yang jawab kakaknya dan mengatakan Saudari Rita sudah tiada. Dia sosok yang selalu mengabari kami jika akan berkunjung ke DPRD Sumbar," ujarnya.

Hardianto juga menambahkan, semoga ranah minang kembali bangkit memperbaiki keadaan memulihkan sarana

transportasi dan segera membantu rumah penduduk yang rusak menjadi baru.

"Dibalik musibah tentu ada hikmah yang mesti kita petik dalam menjaga dan merawat alam ranah minang kembali indah dan nyaman untuk dikunjungi banyak orang serta mensejahterakan kehidupan masyarakatnya," doanya.

Untuk diketahui tahun lalu Bamus DPRD Sumbar juga sempat melaksanakan studi banding ke DPRD Provinsi Riau. Dalam pertemuan tersebut DPRD Sumbar meminta DPRD Riau mendorong Pemerintah provinsi (Pemprov) nya untuk segera merealisasikan kerjasama pada sektor pertanian, pariwisata dan infrastruktur dengan Sumbar.

"Kita berharap Pemprov Riau melakukan percepatan realisasi kerjasama menyangkut tiga sektor tersebut, sehingga kebutuhan Riau terhadap pemenuhan beras, sayuran, buah-buahan, daging hingga ikan dari Sumbar bisa diakomodir. Jadi sekarang kita butuh jumlah rinci melalui angka-angka dan kita bisa mempersiapkannya," ujar anggota DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano.

Dia mengatakan kerjasama antara Riau dan Sumbar merupakan suatu hal yang strategis untuk kedua daerah ini. Ketika Sumbar telah menyuplai dan memenuhi kebutuhan konsumsi pangan ke Riau, Riau silahkan berwisata ke Sumbar dengan diberikan akses kenyamanan.

Sementara itu Anggota Bamus DPRD Sumbar lainnya M Nurnas mengatakan, Bamus memiliki Renja dan rencana strategis Renstra. Dua unsur itu memiliki jangka waktu tertentu, namun setiap pemeriksaan BPK jadwal Bamus merupakan dokumen penting yang dimin-

